

UPAYA PT PUPUK ISKANDAR MUDA DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN PENGANGKUTAN PUPUK KANTONG BERSUBSIDI

Astari Diah Arimbi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: astaridiah.arimbi@gmail.com

Abstract:

The breach of contract in an agreement was a failure fulfillment achievement by PT X towards anything course that has been previously in the agreement in a the previously has handle between PT X and PT PIM as a partner. Research is done by method yuridis-empiris. This research result concluded that PT X has failed to put the outstanding achievements in form of delay carting fertilizer pouch subsidized. PT PIM had worked to complete breach of contract by issuing addendum three times and issued a realization treaty.

Key words: breach of contract, the settlement, tort, covenant transport, subsidized bag of fertilizer

Abstraksi:

Adanya wanprestasi dalam sebuah perjanjian merupakan sebuah kegagalan pemenuhan prestasi oleh PT X terhadap apa-apa saja yang sebelumnya telah di sepakati dalam sebuah perjanjian yang sebelumnya telah ditanda tangani antara PT X dan PT PIM sebagai mitra kerja. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PT X telah gagal melakukan prestasinya berupa keterlambatan pengangkutan pupuk kantong bersubsidi. PT PIM sendiri sudah berupaya untuk menyelesaikan wanprestasi dengan menerbitkan adendum sebanyak tiga kali dan menerbitkan surat realisasi perjanjian.

Kata kunci: penyelesaian, wanprestasi, perjanjian pengangkutan, pupuk kantong bersubsidi

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana rumusan dari berbagai definisi para ahli hukum, maka apa yang disebut hukum itu sendiri terdiri atas empat unsur¹ yaitu: peraturan

¹ Lukman Santoso, **Hukum Perjanjian Kontrak**, Penerbit Cakrawala, Yogyakarta, hal.6

mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; peraturan bersifat memaksa, artinya bahwa setiap orang harus patuh dan taat pada hukum; dan memiliki sanksi terhadap pelanggaran atas peraturan tersebut sehingga bersifat tegas.

Dari pengklarifikasian tersebut tersebut, hal yang terpenting adalah pembagian hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum publik dan hukum privat. Salah satu jenis hukum privat adalah perjanjian. Secara umum, perjanjian tersebut diatur dalam pasal 1313 KUHPerdota. Pada pasal 1313 KUHPerdota tersebut memberikan rumusan tentang perjanjian adalah “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”². Subekti sendiri memberikan definisi dari perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam perjanjian ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut atau terjadinya perikatan sehingga perjanjian ini bersifat *konkret*.

Wanprestasi adalah keadaan dimana seorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh perjanjian hukum. Pada umumnya debitur dikatakan wanprestasi manakah ia karena kesalahannya sendiri tidak melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

Wanprestasi berarti debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan atau ingkar janji, melanggar perjanjian serta melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Debitur dianggap wanprestasi bila ia telah memenuhi syarat-syarat dalam keadaan lalai maupun dalam keadaan sengaja.

Salah satu contoh kasus pengangkutan Pupuk Knatong Bersubsidi di PT Pupuk Iskandar Muda. Pada kasus ini terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pengangkutan barang (pupuk kantong bersubsidi) yakni pihak penyelenggara pengangkutan atau perusahaan pengangkutan terlambat mengangkut barang dari

² ibid hal.7

gudang penyimpanan di pabrik (gudang Lini 1) ke gudang pendistribusian di kota yang telah disepakati pada saat mengikat perjanjian pengangkutan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis adalah faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam kasus perjanjian pengangkutan pupuk kantong subsidi PT Pupuk Iskandar Muda dan bagaimana upaya PT Pupuk Iskandar Muda dalam menyelesaikan masalah wanprestasi perjanjian pengangkutan pupuk kantong bersubsidi.

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam kasus PT Pupuk Iskandar Muda dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya penyelesaian yang ditempuh atau dilakukan oleh PT Pupuk Iskandar Muda untuk menyelesaikan masalah wanprestasi perjanjian pengangkutan pupuk kantong bersubsidi.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris karena hendak mengetahui faktor yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi pada perjanjian pengangkutan pupuk kantong bersubsidi PT Pupuk Iskandar Muda dikaitkan dengan pasal 1313, 1239, 1243, 1249, 1250, 1267 KUHPerdara , pasal 90-98 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan UU No. 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Pengangkutan Jalan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan menggunakan pola penelitian atau sifat penelitian studi lapang dan *community survey*. Pendekatan dilakukan secara yuridis sosiologis karena membahas mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi dalam kasus perjanjian pengangkutan pupuk kantong bersubsidi PT Pupuk Iskandar Muda dalam menyelesaikan masalah wanprestasi perjanjian pengangkutan barang

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus³

PT PIM melakukan perjanjian kerjasama dengan PT X dalam rangka PERJANJIAN PENGANGKUTAN PUPUK KANTONG BERSUBSIDI dengan nomer perjanjian 16/SP/DIR/PIM/LSM/2012 perjanjian pengangkutan pupuk kantong bersubsidi yang dibuat dan ditandatangani di kabupaten Aceh Utara pada hari Selasa pada tanggal 24 Januari 2012 yang ditandatangani oleh PT PIM dan PT X. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian yaitu: 1)PT PIM sebagai pihak yang memproduksi pupuk urea dan produk samping lainnya yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh 2) PT X selaku EXPEDITUR, yang mana dalam perjanjian tersebut berarti badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan pengangkutan pupuk kantong bersubsidi yang berlokasi di Aceh. Kedua belah pihak atau para pihak yang secara bersama-sama telah melakukan itikad baik telah sepakat dan setuju untuk menandatangani perjanjian ini yang mengikat para pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu.

Adapun jangka waktu perjanjian ini berlaku pada tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012 dan dapat diperpanjang dengan menggunakan kesepakatan para pihak dalam bentuk pembaharuan kontrak (adendum). Pada Adendum I yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2012 dengan Nomor: ADD-1/16/SP/DIR/PIM/LSM/2012 terdapat beberapa pasal yang berubah yang menyangkut substansi maksud dan tujuan (pasal 1) dan imbalan jasa (pasal 2). Selanjutnya PT PIM melakukan perubahan melalui Adendum II pada tanggal 29 Juni 2012 menyangkut perpanjangan jangka waktu pengangkutan. Dan melakukan perubahan kembali berupa adendum III yang menyangkut perpanjangan waktu pengangkutan. Terdapat perubahan berupa adendum II karena

³ Diolah dari jenis sumber data primer wawancara dengan bagian Hukum PT Pupuk Iskandar Muda dan Perjanjian pengangkutan Nomer 16/SP/DIR/PIM/LSM/2012

ketidak mampuan PT X untuk mengangkut kekurangan dari jumlah yang seharusnya mereka angkut dari jumlah 375 Ton barang (pupuk kantong bersubsidi) yang baru selesai mereka angkut keluar dari gudang Lini 1 kawasan PT PIM sebanyak 200 Ton (berdasarkan surat realisasi pengangkutan) dan masih terdapat sisa sebanyak 175 Ton di gudang produksi.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan pupuk kantong bersubsidi

a. Jenis perjanjian yang dilakukan oleh PT Pupuk Iskandar Muda dengan Rekanan Kerja.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyaluran mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok pupuk tani dan/ atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian.⁴

Jika dilihat dari jenis perjanjiannya maka PT PIM dan rekanannya PT X melakukan proses perjanjian timbal balik. Suatu perjanjian dinyatakan sebagai perjanjian timbal balik apabila di dalam perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban pokok pada kedua belah pihak. Di dalam perjanjian pengangkutan, baik pihak pengangkut maupun pihak pengirim mempunyai kewajiban pokok yang harus dilaksanakan.⁵ Kewajiban pokok bagi kedua belah pihak dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa barang dari satu tempat ke tempat lain sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya⁶. Dalam penelitian ini, Perjanjian Pengangkutan Barang yang dilakukan antara PT PIM dengan PT X (Rekanan) tergolong dalam perjanjian timbal balik. Dikatakan demikian karena PIM memberikan pekerjaan kepada pihak pengangkut berupa

⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer : 17/M-DAG/PER/6/2011, Tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Pasal 1 ayat 1

⁵ Rahayu Hartini, **Hukum Pengangkutan Di Indonesia**, PT Citra Mentari, 2012. Hal 11

⁶ Subekti, **Aneka Perjanjian**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. Hal 58

pengangkutan pupuk dalam rangka untuk melakukan penyaluran pupuk bersubsidi ke daerah-daerah dan pihak pengangkut menyanggupi untuk melaksanakan pengangkutan pupuk dari PIM sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pengangkutan pupuk kantong bersubsidi.

Dalam perjanjian pengangkutan itu pihak pengangkut dapat dikatakan sudah mengakui menerima barang-barang dan menyanggupi untuk membawanya ketempat yang telah ditunjuk dan menyerahkannya kepada orang yang dialamatkan⁷. Perjanjian pengangkutan ini tidak diatur dalam BW tetapi mengenai pengangkutan terdapat berbagai peraturan diluar BW yaitu dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan raya (diatur dalam UU NO 14 TAHUN 1992 Tentang lalu lintas pengangkutan jalan).⁸

Dalam pasal 43 UU NO 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Pengangkutan Jalan Raya⁹ adalah (1) pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang atau barang, setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan atau pengirim barang. PIM menjanjikan berupa imbalan jasa setelah pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pengangkut selesai mengangkut atau selesai melakukan pekerjaannya dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati di dalam perjanjian kerjasama. Hal ini terdapat dalam pasal yang ada di perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak PT PIM dan PT X selaku rekanan yang mana ketentuan ini terdapat dalam pasal 2 perjanjian yang berbunyi:

Pasal-2

IMBALAN JASA

1. Besarnya imbalan jasa untuk mengangkut Pupuk Kantong Bersubsidi dari Gudang Lini I dan dari Gudang Lini II ke wilayah Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh, dan dari Gudang Lini II dan Gudang Lini III wilayah Kabupaten/Kota Sumatera Utara adalah sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dimana Lampiran perjanjian ini, dimana lampiran perjanjian tersebut merupakan suatu kesatuan dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

⁷ *Opcit.* Hal 70

⁸ Rahayu Hartini, **Hukum Pengangkutan Di Indonesia**, Citra Mentari , 2012. Hal 43

⁹ UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Pengangkutan Jalan Raya, Pasal 1

2. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini belum termasuk PPN 10% (sepuluh perseratus), sedangkan pajak-pajak lain yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab EKSPEDITUR.
3. Apabila Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak solar selama dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk dapat dilakukan peninjauan atas Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini.
4. Untuk pengangkutan Pupuk Kantong Bersubsidi dari Gudang PIM di Belawan, Gudang PIM di Sigli dan Gudang PIM di Banda Aceh Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini sudah termasuk ongkos muat dan bongkar.
5. Pengangkutan Pupuk Kantong Bersubsidi dari Gudang PIM Lhokseumawe ongkos muat tanggung jawab PIM sedangkan ongkos bongkar menjadi tanggung jawab EKSPEDITUR.

Undang-undang mengatur terdapat perbedaan antara seorang pengangkut dan seorang ekspeditur, seorang ekspeditur hanya memberikan jasa-jasanya dalam soal pengirimannya barang saja dan pada hakekatnya hanya memberikan perantara antara pihak yang hendak mengirimkan barang dan pihak yang mengangkut barang itu.¹⁰ Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila perusahaan rekanan tidak dapat melakukan sesuai apa yang telah diperjanjikan dengan kata lain setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan karena kelalaian, kesengajaan, dan ketidaksengajaan pihak pengangkut, maka dapat dikatakan bahwa pihak pengangkut telah melakukan tindakan wanprestasi.

Hal ini seperti yang diutarakan oleh bapak M. Taufiq bagian hukum dan Bapak Usni bagian Pendistribusian bahwa dalam pengangkutan pupuk kantong bersubsidi terjadi wanprestasi, diakibatkan gagalnya pemenuhan kewajiban oleh pihak pengangkut untuk memenuhi kewajibannya mengangkut barang ke tempat yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹¹

¹⁰ Subekti, **Aneka Perjanjian**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1995. Hal 70.

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak M. Taufiq dan Bapak Usni tanggal 22, 23 april 2012 di PT Pupuk Iskandar Muda

b. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Rekanan PT PIM (PT X) dikatakan melakukan wanprestasi karena mereka gagal melaksanakan yang telah diperjanjikan yaitu terjadi keterlambatan pengangkutan dengan memberikan alasan bahwa kurangnya armada pengangkut yang disediakan oleh perusahaan ekspeditur sehingga terjadi penumpukan barang di PIM atau gudang lini 1 (satu) sehingga tidak terpenuhinya jumlah quota yang seharusnya diangkut oleh pengangkut atau bersisanya quota yang harus diangkut.

. Suatu perjanjian dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa merugikan salah satu pihak.¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur yang dimaksud dengan wanprestasi adalah:

“si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jadi bentuk prestasi rekanan yang berupa berbuat sesuatu dan atau memberikan sesuatu dikatakan telah dipenuhi apabila seperangkat ketentuan yang melekatinya (mengantarkan tepat waktu, menjamin mutu barang antaran, membayar pajak lain di luar PPN, dan lain-lain) turut dipenuhi pula. Apabila sudah lewat batas waktu yang ditentukannya dalam perjanjian, rekanan tersebut dikatakan wanprestasi.¹³ Kecuali, keterlambatan tersebut diakibatkan oleh hal-hal lain yang dalam perjanjian ini disebut dengan *force majeure* (Pasal 10 Perjanjian Pengangkutan Pupuk Kantong Bersubsidi).

Dalam halnya rekanan PT PIM dikatakan wanprestasi karena PT X melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi terlambat melakukannya karena rekanan atau pihak ekspeditur itu terlambat mengangkut dengan beralasan bahwa kekurangan armada pengangkut. Adapun faktor penyebab

¹² Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT Intermasa, Jakarta, 1987. Hal 45

¹³ Pasal 1238 KUHPerdata

wanprestasi yang terjadi di PIM ini merupakan wanprestasi yang terjadi dari external karena yang melakukan wanprestasi itu dari pihak pengangkut bukan dari pihak perusahaan atau PT PIM sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PIM yaitu Bapak M.Taufiq bahwa terjadinya wanprestasi dari pihak external karena PT X selaku rekanan PT PIM gagal melakukan prestasinya seperti yang dituangkan dalam petikan wawancara.

“...menurut pandangan dan sepengetahuan saya perjanjian pengangkutan dikatakan wanprestasi karena disebabkan banyak faktor pendukung antara lain faktor eksternal yaitu keterlambatan waktu pengiriman barang karena pihak ekspediter kekurangan armada pengangkut”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa pihak PT PIM sudah memenuhi segala kewajibannya yang berkenaan dengan isi perjanjian pengangkutan pupuk bersubsidi tersebut. Adapun faktor penyebab keterlambatan pengiriman sebagaimana yang diterangkan informan adalah kekurangan armada pengangkut yang mengakibatkan quota pupuk yang dapat dibawa menjadi lebih sedikit.

3. Upaya PT Pupuk Iskandar Muda Dalam Menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan pupuk kantong bersubsidi

a. Unsur wanprestasi yang terdapat dalam kasus

Dalam halnya rekanan PT PIM dikatakan wanprestasi karena rekanan PT PIM melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi terlambat melakukannya karena rekanan atau pihak ekspediter itu terlambat mengangkut dengan beralasan bahwa kekurangan armada pengangkut. Adapun faktor penyebab wanprestasi yang terjadi di PIM ini merupakan wanprestasi yang terjadi dari external karena yang melakukan wanprestasi itu dari pihak pengangkut bukan dari pihak perusahaan atau PT PIM sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PIM yaitu Bapak M.Taufiq bahwa terjadinya wanprestasi dari pihak external karena PT X

selaku rekanan PT PIM gagal melakukan prestasinya seperti yang dituangkan dalam petikan wawancara.

“...menurut pandangan dan sepengetahuan saya perjanjian pengangkutan dikatakan wanprestasi karena disebabkan banyak faktor pendukung antara lain faktor eksternal yaitu keterlambatan waktu pengiriman barang karena pihak ekspediter kekurangan armada pengangkut”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa pihak PT PIM sudah memenuhi segala kewajibannya yang berkenaan dengan isi perjanjian pengangkutan pupuk bersubsidi tersebut. Adapun faktor penyebab keterlambatan pengiriman sebagaimana yang diterangkan informan adalah kekurangan armada pengangkut yang mengakibatkan quota pupuk yang dapat dibawa menjadi lebih sedikit.

BW mengatur tentang rumusan unsur-unsur wanprestasi antara lain¹⁴

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Apabila yang dimaksud dengan ia adalah PT X melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kontrak kerja dimana PTX terlambat melakukan pengangkankutan atau melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan dan dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai seperti yang tertuang dalam SURAT REALISASI PENGANGKUTAN nomer: 1811/PS 0502/3130 yang dikirimkan oleh PT PIM kepada PT X yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁴ Opcit. Hal 45

“berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemantauan kami terhadap pelaksanaan pemuatan, pengangkutan dan pembongkaran pupuk urea bersubsidi ke gudang PT PIM, kota Bangun, Sumatera Utara, maka dengan ini kami sampaikan catatan mengenai jumlah pupuk yang belum diangkut sampai saat ini berdasarkan surat perintah kerja yang dikeluarkan tanggal 7 Desember 2012 sebanyak 200 ton. Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta perhatian dan mengingatkan saudara untuk dapat memulai melaksanakan kerja tersebut selambat-lambatnya tanggal 26 Desember 2012”

Berdasarkan surat Realisasi Pengangkutan yang dikirimkan oleh PT PIM kepada PT X dapat dilihat secara jelas bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT X adalah keterlambatan pengangkutan pupuk atau demi perikatannya sendiri menetapkan bahwa si berutang dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.

Di dalam perjanjian kerja tidak diatur secara khusus mengenai klausula wanprestasi tapi secara tidak langsung dibahas atau terdapat pembahasan pada pasal 7.

Kerugian kerugian yang ditimbulkan oleh PT PIM akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PT X

Adapun kerugian yang dialami oleh berbagai pihak antara lain :

1. Bagi PT PIM

- a. Terhambatnya proses produksi di pabrik;
- b. Penuhnya gudang lini 1 kawasan produksi PT PIM;
- c. Terhambatnya proses penyaluran barang ke distributor-distributor PIM.

2. Bagi Masyarakat:

- a. Sulitnya mendapatkan pupuk Bersubsidi akibat adanya kelangkaan;
- b. Naiknya harga pupuk bersubsidi di pasaran;

Akibat penting dari suatu wanprestasi adalah adanya kerugian yang dialami kreditur dan kerugian tersebut dapat dimintakan penggantian.

Yang dimaksud dengan kerugian dapat dimintakan penggantian terdapat pada pasal 1234 KUHPerdara yang tidak hanya berupa biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan oleh kreditur (*konste*) dan kerugian yang benar-benar diderita sehingga mengakibatkan berkurangnya harta kekayaan kreditur karena wanprestasi tersebut (*schaden*), akan tetapi kerugian juga dituntut atas kehilangan yang berupa keuntungan yang batal diperoleh akibat terjadinya wanprestasi tersebut (*intersen*).¹⁵

Adapun akibat hukum yang terjadi atau yang timbul dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT X kepada PIM antara lain :

- A. Menurut Perjanjian yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak (PT PIM dan PT X) adapun akibat hukum adanya wanprestasi yang terjadi tertuang dalam pasal 7 ayat 2,3,4, dan 7 serta hasil wawancara dengan narasumber.

Adapun isi pasal yang dimaksud adalah:

Pasal – 7

SANKSI

2. Semua akibat hukum yang timbul akibat pelanggaran ketentuan (sebagaimana yang diatur didalam perjanjian ini) yang dilakukan oleh EXPEDITUR menjadi tanggung jawab EXPEDITUR, dan EXPEDITUR membebaskan PIM dari seluruh tuntutan Hukum yang timbul.
3. PIM berhak secara sepihak untuk memutuskan perjanjian ini apabila EXPEDITUR melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
4. PIM akan langsung memperhitungkan dan memotong Imbalan jasa EXPEDITUR akibat sebagaimana disebut pada pasal 5 ayat 9 huruf c,d,e dan g.
- 7 PIM Berhak untuk memberikan masa skorsing/pemberhentian sementara untuk melaksanakan pekerjaan kepada EKSPEDITUR:
 - a. Menghambat penyaluran pupuk kantong bersubsidi;
 - b. Dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan atau kejaksaan ;
 - c. Menjalani proses persidangan.

¹⁵ Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, Cetakan XXVI, 1985. Hal 148

B. Akibat Hukum Wanprestasi bagi PT X adalah:

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dapat dikatakan ganti-rugi;
- 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- 3) Peralihan resiko;
- 4) Membayar perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Akibat hukum juga dibahas atau terdapat pembahasan di dalam Pasal 1267 KUHPerdara mengatakan bahwa:

“pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, rugi dan bunga”.

Menurut pasal 1267 tersebut, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai itu dengan: pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, rugi dan bunga (disingkat ganti rugi). Dengan sendirinya ia juga dapat menentukan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, misalnya penggantian kerugian karena pemenuhan itu terlambat, atau kualitas barangnya kurang dan lain sebagainya. Mungkin juga ia menuntut ganti kerugian saja, dalam hal mana itu dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan maupun pembatalan. Dan juga ia dapat menuntut pembatalan saja.

Menurut pasal 1267 dapat ditarik kesimpulan atau dapat ditetapkan bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan perjanjian;
- 2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- 3) Ganti rugi saja;
- 4) Pembatalan perjanjian;
- 5) Pembatalan disertai ganti rugi.

Perlu kiranya diperingatkan supaya jangan menganggap pemenuhan perjanjian sebagai suatu sanksi atas kelalaian, sebab hal itu memang sudah dari semula menjadi kesanggupan si debitur.¹⁶

¹⁶ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, cetakan ke XII, Jakarta 1987. Hal 45 - 53

Dengan adanya akibat hukum yang timbul dari wanprestasi tersebut maka PT PIM memiliki upaya hukum untuk menyelesaikan kasus wanprestasi yang terjadi diantaranya PT PIM sendiri menggunakan jalur non litigasi dan litigasi yaitu PT PIM memilih jalur kekeluargaan yang di dalam perjanjian sendiri sudah dibahas terdapat pada pasal 11 yang berbunyi :

Pasal – 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat/perselisihan akibat pelaksanaan pekerjaan ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Apabila secara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Lhoksukon.

Walaupun di dalam perjanjian dicantumkan masalah penyelesaian secara litigasi dan nonlitigasi tetapi secara efektif di dalam penyelesaian kasus yang terjadi antara PT PIM dan PT X diselesaikan secara non litigasi. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan narasumber yang dituangkan dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“... upaya-upaya yang dipilih atau diambil oleh perusahaan dalam menyelesaikan kasus wanprestasi ini adalah dengan cara non litigasi atau kita menggunakan jalur kekeluargaan dan atau musyawarah mufakat”

Dan PIM sendiri berusaha menyikapi hambatan-hambatan selama menyelesaikan kasus wanprestasi yang dilakukan dengan PT X cukup sederhana seperti yang diungkapkan oleh narasumber dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dan dituangkan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“... cara perusahaan (PT PIM) menyikapi dengan perusahaan akan sebisa mungkin melakukan komunikasi dengan pihak yang melakukan wanprestasi agar kasus tersebut tidak berlarut-larut sehingga menghindari dibawanya kasus tersebut ke jalur hukum karena pihak PIM sendiri lebih menginginkann untuk penyelesaian kasus yang selama ini terjadi dengan cara kekeluargaan dan musyawarah dimana pada prinsipnya PIM sendiri menganggap bahwa semua rekanan kerja merupakan satu kesatuan keluarga dengan PIM maka setiap kasus yang terjadi sebisa mungkin akan diselesaikan atau dicoba untuk diselesaikan secara kekeluargaan tanpa perlu campur tangan pihak ke 3 atau pihak luar”

F. PENUTUP

Berdasarkan uraian analisi dan pembahasn sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab wanprestasi sendiri berasal dari faktor eksternal atau faktor yang terjadi dari luar dalam hal ini PT X bukan berasal dari pihak internal atau pihak dalam dalam hal ini PT PIM. Faktor penyebab keterlambatan sendiri sebagaimana yang diutarakan oleh informan karena adanya kekurangan armada pengangkut yang mengakibatkan quota pupuk yang diangkut menjadi lebih sedikit dan terjadi penumpukan barang atau pupuk digudang produksi Lini I kaasan produksi PT PIM.
2. Upaya yang dilakukan PT PIM menggunakan jalur kekeluargaan atau non litigasi seperti yang diungkapkan oleh informan dan dalam proses itu sendiri pihak PT PIM sudah berupaya dengan menerbitkan adendum sebanyak tiga kali dan juga PT PIM sendiri sudah menerbitkan surat realisasi pengangkutan dimana surat itu berfungsi sebagai surat peringatan adanya jumlah barang yang belum selesai mereka angkut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Lukman Santoso. **Hukum Perjanjian Kontrak**, Penerbit Cakrawala, Yogyakarta .

Rahayu Hartini. **Hukum Pengangkutan Di Indonesia**, PT Citra Mentari, 2012.

Subekti, **Aneka Perjanjian**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. 1995.

Subekti. **Hukum Perjanjian**, Intermasa, cetakan ke XII, Jakarta ,1987

Subekti. **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, Cetakan XXVI, 1985.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang –undang Hukum Perdata

Kitab Undang- Undang Hukum Dagang

UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Pengangkutan Jalan Raya

C. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indoneia Nomer : 17/M-DAG/PER/6/2011, Tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.